

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 562/Akuntansi

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)
DAN PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sawahlunto)**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**Witra Maison, SE. M.Si / 1022026304 / Ketua
Siska Yulia Defitri, SE. M.Si / 1023078301 / Anggota**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
JUNI 2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus OPD Kota Sawahlunto)

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Witra Maison, SE. M.Si

NIDN : 1022026304

Jabatan Fungsional : Lektor

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Nomor HP : 081363310206

Alamat surel (e-mail) : witramaison.02@gmail.com

Anggota Tim

Nama Lengkap : Siska Yulia Defitri, SE. M.Si

NIDN : 1023078301

Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Tahun Pelaksanaan : 2019

Sumber Dana : Mandiri

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 6.500.000,-

Biaya Keseluruhan : Rp. 6.500.000,-

Solok, 29 Juni 2019


Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

(**Juana Sunkrani, SE. M.Si**)
NIDN. 1017116201

Ketua,


(**Witra Maison, SE. M.Si**)
NIDN. 1022026304

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(**DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM**)
NIDN: 1019017402



DAFTAR ISI

RINGKASAN	1
1. PENDAHULUAN	2
2. LANDASAN TEORI	7
3. METODE PENELITIAN	36
4. PEMBAHASAN	45
5. PENUTUP	74
6. DAFTAR PUSTAKA	76

LAMPIRAN

**PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DAN PERAN
INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

(Studi Kasus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sawahlunto)

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (2) pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.(3) pengaruh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan cara menyebar kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (2) peran internal audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (3) sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan peran internal audit bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kunci : Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Peran Internal Audit

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada masa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini sangatlah diperlukan informasi-informasi yang menunjang bagi kemajuan dan kepentingan organisasi, baik organisasi sektor privat maupun sektor publik. Organisasi sektor privat contohnya usaha nirlaba seperti PT, CV, dan organisasi yang memiliki bertujuan untuk memperoleh laba, sedangkan sektor publik contohnya Institusi pemerintahan. Pemerintahan bertugas untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai salah satu wujud bentuk pentingnya pemerintahan dalam suatu negara. Dan setiap pemerintahan memiliki bidang keuangannya sendiri untuk mengelola keuangannya.

Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 yang ditandai dengan diterbitkannya peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan negara, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Setelah undang-undang tersebut, dibuat beberapa peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Dengan terjadinya reformasi pengelolaan keuangan Negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara dalam mengubah pola administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelolaan keuangan negara (financial management).

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (good governance), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan good governance, diantaranya pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2005 telah dikeluarkan paket Undang-undang Pengelolaan Keuangan Negara yang meliputi, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga Undang-undang ini

merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara sekaligus menuntut suatu perubahan mendasar di bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan selama ini, negara telah membuat aparat pemerintah yang bergerak dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelusuran kembali pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk menetapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan sesuai dengan lingkungan pemerintah (PP No. 60 Tahun 2008).

Sejalan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan juga sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang accountable, dalam rangka mengelola dana secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Sistem keuangan daerah yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat di tugas dan Instansi Pemerintah tersebut (PP No. 60 Tahun 2008).

Perbedaan penerapan sistem informasi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Dalam prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas, hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas (Maryana, 2011).

Namun setelah dikeluarkannya Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Berbasis Akrua. Karena dalam Laporan Keuangan berbasis akrua, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Daerah pertama kali yang melakukan Laporan Keuangan Berbasis Akrua adalah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014. Dan Kota Semarang menjadi pelopor pelatihan bendahara dari instansi pemerintah lain yang ada di Indonesia untuk melakukan Laporan Keuangan Berbasis akrua pada tahun 2015.

Fenomena yang terjadi tentang Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tak juga meningkat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPP Kota Sawahlunto Tahun 2014 atau sama dengan opini yang diberikan atas LKPP Tahun 2013. Selama tahun 2014 pemerintah sebenarnya telah memperbaiki permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan tahun 2013. Namun pada tahun 2015 Kota

Sawahlunto berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kali dan ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan pemerintah Kota Sawahlunto dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga didapatkan Kota Sawahlunto pada tahun 2016 dan 2017. Hal Ini menjadi bukti bahwa Kota Sawahlunto masih dapat mempertahankan kualitas laporan keuangannya dan mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah baik, dan diharapkan kedepannya bisa ditingkatkan lagi melalui pembenahan dan pembinaan di beberapa aspek seperti meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah mengenai pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang lebih memadai melalui peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. (<http://www.padang-bpk.go.id> - minggu,13-01-2019-19:37WIB)

Fenomena yang terjadi tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah yaitu SIMDA yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak terutama oleh pemerintah daerah. Karena merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. SIMDA keuangan dirancang oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pusat (BPKP) untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini dianggap penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya good governance. Dan Kota Sawahlunto baru memulai Sistem Informasi

Manajemen Daerah (SIMDA) pada Tahun 2016 sebagai salah satu sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan yang berkualitas.

Hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah adanya peran internal audit. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo saat memberikan keynote speech pada lokalkarya Aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP).

Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Dengan demikian internal audit dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Dalam penelitian terdahulu Sutaruno (2014) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKD) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo. Hal yang sama juga disampaikan peneliti terdahulu Kuncoro (2017) dalam penelitiannya dimana setiap variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Pada penelitian terdahulu Yuliani (2010) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua variabel independen yang diturunkan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Syarifudin (2014) dalam penelitiannya tidak semua variabel independennya berpengaruh positif terhadap variabel dependennya.

Di Kota Sawahlunto dalam pelaksanaannya memakai Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan di setiap daerah aplikasi yang digunakan sama tapi dengan nama yang berbeda oleh daerahnya masing-masing. Dan dalam peran internal audit secara sepintas terlihat mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Objek pada penelitian ini adalah salah satu unit pelaksana teknis bidang penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Dinas Pemerintah Kota Sawahlunto. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan

judul **”Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada OPD di Kota Sawahlunto)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Apakah peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Apakah sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan peran internal audit berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perkembangan teori dalam bidang akuntansi keuangan dan pengauditan khususnya mengenai sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan

peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di OPD Kota Sawahlunto, Serta merupakan sebuah kesempatan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapat semasa bangku perkuliahan, dan dapat dijadikan acuan dan referensi dalam melakukan penelitian yang akan datang dan mengembangkan penelitian ini lebih luas lagi.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas / instansi. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan entitas yang jelas.

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 laporan keuangan daerah adalah Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Yuliani (2010) mendefinisikan rendahnya kualitas laporan keuangan disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri atau belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan dan lemahnya peran internal audit. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang berkualitas mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Mahmudi (2010) menjelaskan laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya tetapi justru untuk

membantu mereka dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari Pemerintah pusat, Pemerintah daerah Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah dan organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melakukan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap undang-undang.

2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang berkualitas mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturann perundang undangan. (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna bagi pengguna dalam evaluasi keputusan dan sebagai alat ukur akuntabilitas entitas

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pembuat keputusan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi kewajiban ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumberdaya ekonomi kewajiban ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan alokasinya penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas.
6. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Informasi yang berguna untuk evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendandai aktvitas nya.

Entitas pelaporan harus menerapkan pencatatan neraca basis akrual, mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibebankan dalam waktu lebih dari dua belas bulan. Apabila suatu entitas memiliki aset yang akan dilibatkan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi atas aset. Neraca akan memberikan informasi mengenai aset yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya yang termasuk klasifikasi aset lancar dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang yang termasuk klasifikasi aset tidak lancar.

Madjham (2011) menyatakan Laporan keuangan tersebut merupakan pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Permasalahan akuntabilitas publik bisa muncul apabila pemerintah daerah tidak mampu menyajikan informasi mengenai kinerja pemerintah secara relevan, handal, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai konstituennya. Di sisi lain, permasalahan juga bisa muncul apabila masyarakat tidak memahami laporan kinerja

yang disajikan oleh pemerintah.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2010;56) kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat Waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin

relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Suatu laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Melalui sistem pengendalian internal upaya untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih di pacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpedoman pada 4 poin yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Tanpa 4 poin tersebut sebuah laporan keuangan belum dapat berkualitas yang memiliki nilai tinggi dalam laporan tersebut. Seperti halnya dengan kita yang tidak memahami sebuah laporan, tentunya kita akan merasa bingung.

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah tidak di rancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka laporan keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang di tentukan oleh perundang undangan. PP No.24 tahun 2005 paragraf 14 dikutip oleh Abdul Halim Syam Kusufi (2012;265) terdapat 6 komponen laporan keuangan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran(LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Basis akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada komponen laporan keuangan pemerintah. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 ada beberapa penambahan komponen laporan keuangan pemerintah. Adul Hafiz Tanjung (2012;12) memaparkan komponen Laporan keuangan pokok pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisai Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari entitas pelaporan. Informasi LRA berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. LRA memuat informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode selanjutnya, LRA disajikan secara komparatif. LRA menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat sebagai alat penilaian kegiatan/program yang dilaksanakan secara efisien, efektif, serta sesuai dengan anggaran APBN/APBD dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftarrinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Struktur LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan struktur lebih dikarenakan adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah. Entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset yang akan dilibatkan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi atas aset. Neraca akan memberikan informasi mengenai aset yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya yang termasuk klasifikasi aset lancar dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang yang termasuk klasifikasi aset tidak lancar.

Entitas pelaporan harus menerapkan pencatatan neraca basis akrual, mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibebankan dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- a. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan.
- b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
- d. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya maka, penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih berkualitas bagi pengguna.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Informasi LAK berguna sebagai indikator jumlah arus kas di periode mendatang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. LAK menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. LAK memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah, yang bertujuan agar dapat memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami secara keseluruhan oleh pengguna secara luas, tidak terbatas hanya untuk lingkungan

pemerintah. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CaLK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi ataupun menghilangkan substansi informasi yang harus disajikan.

Informasi dalam laporan keuangan berguna untuk mengetahui jumlah serta macam aset tetap yang dimiliki maupun anggaran yang di kelola. Pencatatan atas aset tetap dan anggaran yang dikelola instansi pemerintah ini berguna untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Kinerja pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas serta masyarakat dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah tersebut sehingga tercapainya good governance.

Laporan keuangan sudah bersifat general purposive dengan kata lain dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi semua pihak, tetapi tidak semua pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah dengan baik. Hal ini terjadi disebabkan karena, perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Mengatasi hal tersebut, agar pengguna dapat menginter-pretasikan informasi yang terkandung didalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah.

2.2 Sistem Informasi Manajemen

2.2.1 Pengertian Sistem

Menurut Sutabri (2012;6) pada dasarnya sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Atmosudirdjo (2012;7) mendefinisikan bahwa sistem adalah sebagai berikut. Suatu sistem yang terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen - komponen yang saling berhubungan satu sama lainnya sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.

Selanjutnya Menurut Yakub (2012;1) bahwa sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli, dapat dinyatakan bahwa sistem adalah sekelompok unsur- unsur yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk

satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama agar menghasilkan sesuatu yang berkualitas.

Dari menurut beberapa para ahli menjelaskan bahwa sistem adalah suatu unsur atau komponen yang terhubung dan memiliki tujuan yang sama. Sistem juga berfungsi dalam menghasilkan sebuah informasi yang berguna bagi penggunanya. Terutama dalam organisasi atau instansi kita harus memiliki sistem yang tepat dalam pengambilan keputusan, bahkan dalam di dalam pemerintahan di haruskan memiliki sistem yang baik dalam kinerjanya.

Unsur-unsur dalam sistem tersebut saling berhubungan satu sama lain untuk memudahkan arus informasi agar tercapai tujuan bersama. Dan di dalam suatu sistem dibutuhkan suatu unsur-unsur yang digunakan sebagai penggerak atau saling berinteraksi satu sama yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah organisasi atau instansi.

2.2.2 Pengertian Informasi

Menurut Yakub (2012;8) informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Menurut Sutabri (2012;22) informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya Susanto (2012;46) mendefinisikan informasi sebagai hasil pengelolaan data yang memberikan arti dan manfaat yang dapat digunakan.

Dari definisi-definisi para ahli yang dimaksud dengan informasi adalah data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan memiliki nilai bagi pengambilan keputusan saat ini atau di masa yang akan datang. Agar menjadi tolak ukur bagi penggunanya dalam memanfaatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Informasi dapat juga dikatakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Informasi juga dapat bersumber dari data yang kita peroleh dalam suatu kegiatan kerja. Bahkan data yang kita peroleh juga dapat mempengaruhi suatu keputusan oleh seorang pimpinan, yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

2.2.3 Pengertian Manajemen

Menurut Nugroho (2010;58) manajemen adalah suatu tim yang disusun oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi. Menurut Bangun (2012;38) manajemen adalah rangkaian aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurut Stoner (2011;60), pengertian manajemen adalah Suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi para ahli, penulis berpendapat bahwa manajemen meliputi rangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Dalam tujuannya untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi pelaksana aktivitas manajemen itu sendiri. Dimana setiap pelaksana manajemen memiliki standarnya masing-masing dalam pelaksanaannya.

Manajemen juga dapat diartikan sebagai suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian dalam menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya. Dan juga dapat diartikan bahwa manajemen adalah suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu.

2.2.4 Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Menurut Mcleod (2010;11) sistem informasi manajemen (SIM) adalah sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Menurut Jogiyanto (2011;14) sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi- informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen.

Berdasarkan pada beberapa definisi-definisi para ahli dapat diartikan bahwa sistem informasi manajemen adalah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer dalam membuat keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen yang baik dan berguna bagi mereka yang membutuhkan. Dan sebagai pembanding dalam pengambilan keputusan yang akan datang.

2.2.5 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Sutaruno (2014) menyatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

Program SIMDA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang di distribusikan di setiap SKPD dengan sistem *database* terintegrasi, sehingga *outputnya* dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

2.2.6 Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP,2013) adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima

koneksitas jaringan SIMDA.

- 2) Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *webcam* bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- 3) Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya.
- 4) Sebagai media awal bagi pelaksanaan *e-government*. Sebagai sarana untuk pelaksanaan *good government*.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan Sistem Aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP,2013) adalah sebagai berikut :

- 1) Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama.
- 2) Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin), dan
- 3) Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
- 4) Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

2.2.7 Klasifikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2013), yaitu :

1. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
2. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagaipendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
3. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/ lembaga.

Dalam pengklasifikasian SIMDA ada tiga tingkatan yang harus kita perhatikan. Pertama Sistem Informasi Eksekutif yang berpedoman pada pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan sebagai pendukung bagi pimpinan. Kedua Sistem Informasi fungsional yang berpedoman pada pendukung informasi strategi pimpinan daerah.

Ketiga Sistem Informasi Operasional yang menunjang pada tugas pokok masing- masing dinas/lembaga dalam tingkatan pemanfaatan Sistem Informasi. Terlebih lagi berguna bagi para petinggi daerah yang memanfaatkan informasi untuk pelaksanaan kinerja para pegawainya. Dan untuk kelangsungan kerja suatu organisasi.

2.2.8 Unsur Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP,2013), yaitu sebagai berikut :

1. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.
2. Portal, pelayanan publik, situs *web* pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

Unsur dari SIMDA banyak membahas bagaimana suatu kerangka arsitektur memiliki lapisan strukturnya, yang terdiri dari bagaimana akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik. Dan juga bagaimana portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi.

Pada lapisan ketiga organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi. Lapisan keempat infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana yang berbentuk perangkat keras dan lunak yang mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

2.2.9 Prosedur Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Prosedur Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menurut Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2013 yang mengacu pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi:

1. Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan cash basis selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan accrual basis untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

2. Penggolongan dan pengikhtisaran, adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.
3. Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatanatas laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pihak-pihak yang memerlukannya laporan tersebut antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawasan Keuangan, Investor, Kreditor, dan Donatur, Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah, Rakyat, pemerintah Daerah lain, dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Dan juga pada pencatatan merupakan bagian keuangan yang melakukan pencatatan *double entry* dengan menggunakan *cash basis* atau *accrual basis* selama tahun anggaran. Pada penggolongan dan pengikhtisaran adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan posnya masing-masing. Pelaporan merupakan proses akhir dari suatu kegiatan dalam laporan keuangan.

2.2.10 Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

1. SIMDA Versi 1.0

Aplikasi SIMDA versi 1.0 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah, dan draf sistem akuntansi pemerintah yang sedang tahap pengembangan saat itu. Sistem ini dipakai sampai tahun 2004.

2. SIMDA Versi 2.0

Aplikasi SIMDA versi 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya akibat dari adanya perubahan dan penambahan acuan peraturan yang mendasarinya, yaitu

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP No. 24 tahun 2005 mengenai SAP, dan PP No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai aplikasikan sejak tahun 2004 sampai tahun 2006.

3. SIMDA Versi 2.1

SIMDA Versi 2.1 merupakan sistem informasi versi terbaru yang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri No. 3 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai diaplikasikan sejak tahun 2006 dan sampai saat ini masih digunakan dengan beberapa penyempurnaan, misalnya dengan adanya perubahan ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Dalam SIMDA versi pertama merupakan sistem keuangan pertama kali yang dikembangkan oleh BPKP pada tahun 2003. Dan juga mengacu pada pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pada SIMDA versi kedua merupakan penyempurna dari versi sebelumnya yang mendasari pada peraturan pemerintah terbaik.

Pada versi ketiga merupakan versi terbaru yang berkembang dari akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. dan juga versi ketiga juga dapat dikembangkan lebih baik lagi, untuk mencapai tuntutan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam laporan keuangan.

2.2.11 Output yang Dihasilkan

Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan (BPKP,2013) adalah :

1. Penganggaran
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - c. Surat Penyediaan Dana (SPD).
2. Penatausahaan
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- b. Surat Perintah Membayar (SPM)
- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- d. Surat Tanda Setoran (STS)
- e. Register
- f. Surat pengendalian lainnya.

3. Akuntansi dan Pelaporan

- a. Jurnal
- b. Buku Besar
- c. Buku Pembantu
- d. Laporan Realisasi Anggaran
- e. Laporan Arus Kas
- f. Neraca

Program Aplikasi SIMDA keuangan didukung dengan :

- a. Buku manual sistem dan prosedur penganggaran
- b. Buku manual sistem dan prosedur penatausahaan
- c. Buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
- d. Buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA keuangan.

Dalam output yang dihasilkan dalam SIMDA yaitu penganggaran meliputi rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan surat penyediaan dana. Dalam penatausahaan lebih banyak tentang surat-surat dan register yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan akuntansi dan pelaporan mengacu pada jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program aplikasi SIMDA juga didukung dengan buku manual sistem dan prosedur penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pedoman pengoperasian aplikasi keuangan. Dan juga dapat berguna bagi pengguna dalam menentukan kualitas suatu laporan yang sesuai dengan peraturan pemakaian sistem aplikasi.

2.2.12 Fungsi Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan (BPKP,2013) adalah:

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban).
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan tepat waktu.
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan.
5. Mempermudah proses audit bagi auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi *Electronic Data Processing (EDP)* audit.

Dalam pengimplementasikan aplikasi keuangan dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan tepat waktu dalam pelaksanaannya. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya yang dapat digunakan dengan baik sesuai fungsinya.

Dan juga fungsi Penyajian informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang digunakan oleh pengguna laporan secara maksimal dapat mempengaruhi. Mempermudah proses audit bagi auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi elektronik audit yang dapat mempermudah dalam segala kegiatan kerja.

2.2.13 Keunggulan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan (BPKP,2013) adalah :

1. Output atau laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan
2. Berbasis windows
3. Validasi inputan data lebih terjamin
4. Terdapat menuotoritas dan unit otoritas
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi, dan
6. Memfasilitasi akuntansi penggunaan anggaran.

Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA (BPKP,2013) diantaranya :

a. Sesuai Peraturan

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

b. Kesenambungan *Maintenance*

Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota provinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.

c. *Transfer of Knowledge*

Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan satu kali untuk selamanya.

d. Terintegrasi

SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis. Sehingga setiap transaksi keuangan yang terjadi dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

Dalam keunggulan aplikasi SIMDA yang dihasilkan dalam laporan yang disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat juga menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan. Berbasis windows, dan validasi inputan data lebih terjamin. Karena dapat mempermudah dalam menghasilkan laporan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai undang-undang.

Manfaat lainnya antara lain sesuai peraturan, secara otomatis dilaksanakan dengan

pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada peraturan yang ada. Berkesinambungan lokasi juga merupakan salah satu manfaatnya karena mempermudah dalam pemeliharaan sistem. Adanya pembagian pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparatur pemerintahan. Dan juga program aplikasinya telah terintegrasi sesuai peraturan yang ada.

2.2.14 Pembiayaan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Biaya yang dikenakan terhadap program aplikasi SIMDA (BPKP,2013) ini dapat dikatakan gratis atau tanpa biaya. Jika dibandingkan dengan program aplikasinya, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran, tergantung pada jumlah komputer pengguna yang ingin dipasangkan program tersebut. Hal ini yang membuat SIMDA menjadi pilihan utama berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk dijadikan sebagai basis sistem informasi keuangannya.

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penerapan SIMDA hanya dibutuhkan untuk alokasi tenaga asistensi dan proses-proses pelatihan yang nantinya bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri. Besaran jumlah biaya dana yang dibutuhkan untuk proses asistensi implementasi ataupun pendidikan dan pelatihan SIMDA ini bergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Itu berarti bahwa setiap pemerintah daerah tidak akan dibebankan biaya yang melampaui kemampuan keuangannya.

Pada pembiayaan penerapan SIMDA keuangan tergantung pada pemakaiannya masing-masing. Karena pembiayaannya dilakukan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain sesuai kebutuhan. Namun biaya-biaya tersebut sesuai dengan pemakaian komputer yang dipakai dalam suatu daerah tergantung pemerintah daerahnya.

Dan pemerintah telah menganggarkan biaya dalam pemakaian aplikasi SIMDA. Ini terlihat dalam rencana anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Itu semua tidak akan terlaksana tanpa campur tangan instansi yang bersangkutan. Pembiayaan yang dilakukan juga untuk mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi yang valid.

2.3 Peran Internal Audit

2.3.1 Pengertian Audit Internal

Pengertian Audit Internal atau Internal Auditing menurut *Institute of Internal Auditor* yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2013;56) *Internal auditing is an independent, objective assurance, and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, diciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and governance processes.*

The Institute of internal auditor (2010) yang dikutip oleh Yuliani dkk (2010) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Menurut Mulyadi (2013;16) Audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Sukrisno Agoes (2013;108) mengatakan peran yang dimainkan oleh auditor internal menjadi dua bagian kategori utama:

1. Jasa Asuransi

Merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain. Menurut *Institute of Internal Auditors* dalam *Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal* (2012;5), pengertian dari jasa assurance dalam *Standar Implementasi* adalah kegiatan pemberian penilaian bukti obyektif oleh auditor internal untuk memberikan pendapat atau simpulan mengenai suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau permasalahan lainnya. Sifat dan ruang lingkup penugasan asuransi ditentukan oleh auditor.

2. Jasa Konsultasi

Merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien

(para audit). Dalam melaksanakan jasa konsultasi, auditor internal harus tetap menjaga obyektivitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen. Menurut *Institute of Internal Auditors* dalam Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (2012:6), pengertian dari jasa konsultasi dalam Standar Implementasi adalah jasa yang bersifat pemberian nasihat, yang pada umumnya diselenggarakan berdasarkan permintaan spesifik dari klien atau auditi. Sifat dan ruang lingkup jasa konsultasi didasarkan atas kesepakatan dengan pihak auditi.

Dalam Jasa Konsultasi pada umumnya melibatkan dua pihak, yaitu seorang atau sekelompok orang yang memberikan nasihat – Auditor Internal dan seorang atau sekelompok orang yang menerima nasihat – Klien penugasan/Auditi. Ketika melaksanakan jasa konsultasi, auditor internal harus selalu mempertahankan obyektivitas dan tidak menerima/mengambil alih tanggungjawab manajemen.

Audit internal merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dan juga merupakan pengawasan internal pemerintah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.

2.3.2 Peran Internal Audit

Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota.

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah mereview laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintahan Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada pihak-

pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Dengan adanya pengawasan dari inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan berkualitas.

Audit Internal merupakan suatu kegiatan untuk menilai secara bebas (independen) atas kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi guna memenuhi kebutuhan pihak manajemen dengan cara memberikan analisis, penilaian, komentar dan rekomendasi untuk kemajuan perusahaan. Menurut tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Sektor Publik STAN (2010) yang dikutip oleh (Diani, 2014) tujuan utama dari inspektorat adalah membantu Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Yuliani (2010) menggambarkan lingkup audit internal modern sebagai sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan:

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan
2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis dan
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif.

Dengan adanya pengawasan dari inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan dalam menggambarkan ruang lingkup audit internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda. Dalam informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan merupakan suatu penilaian yang sistematis dan objektif.

Dalam hal tersebut risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi sesuai petunjuk yang ada. Peraturan eksternal serta kebijakan yang ada bisa diterima dan telah diikuti. Kriteria operasi yang memuaskan atau terpenuhi juga merupakan salah satu hal yang baik. Dan tujuan organisasi telah tercapai secara efektif dilakukan dengan tujuan untuk konsultasi.

2.3.3 Tujuan Audit Internal

Sukrisno Agoes (2013;205) berpendapat bahwa pada umumnya, tujuan dilakukannya audit internal dalam suatu perusahaan adalah untuk membantu seluruh anggota organisasi khususnya pihak manajemen dalam menganalisis dan mengawasi tanggung jawab masing-masing anggota, apakah telah berjalan efektif dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh para Internal Auditor perusahaan dalam Sukrisno Agoes (2013; 207), yaitu:

1. Menelaah dan menilai tentang memadai atau tidaknya suatu penerapan sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak mahal.
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur- prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
5. Menilai mutu pekerjaan seriap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pihak manajemen.
6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dimana para Auditor Internal perusahaan dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal agar tujuan dari diselenggarakannya kegiatan pemeriksaan internal perusahaan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam menelaah dan menilai tentang memadai atau tidaknya suatu penerapan sistem pengendalian manajemen secara efektif. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dan memastikan seberapa jauh harta perusahaan atau organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai tugas masing-masing.

Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pihak manajemen. Dan menyarankan perbaikan-perbaikan operasional

dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas para auditor untuk dapat memberikan kontribusinya.

2.3.4 Jenis-jenis Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2013), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (General Audit), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
7. Pemeriksaan Khusus (Special Audit), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan audite yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.

Audit juga dibedakan berdasarkan jenis pemeriksaannya. Menurut Soekrisno Agoes (2013), Ditinjau dari jenis pemeriksaannya audit dibagi menjadi 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

1. Audit Operasional (*Management Audit*),

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*),

Suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakanyang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.

3. Audit Komputer (*Computer Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem Elektronik Data Processing (EDP).

4. Pemeriksaan Internal (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup

laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

Dalam jenis-jenis audit dibedakan antara pemeriksaan umum dan khusus. Bedanya kalau yang umum dengan khusus adalah KAP sebagai lembaga yang mengeluarkan opini yang baik sesuai dengan kinerja masing-masing atas dasar laporan keuangan. Sedangkan khusus lebih pada pemeriksaan yang hanya dibatasi pada permintaan audit.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Manajemen Daerah disingkat SIMDA adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) tentang pengaruh sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintahan Kota Banda Aceh membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat apabila masing-masing SKPD memanfaatkan sebaik mungkin sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

Rahmatia Sutaruno (2014) menemukan bahwa penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Nur Ulfiati (2017) menemukan juga bahwa variabel sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Adi Kuncoro (2017) juga menemukan bahwa sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas

laporan keuangan daerah.

Maka keterkaitan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sistem Informasi Manajemen daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adanya peran internal audit atau peran inspektorat selaku pengawas intern pemerintah dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, handal, dan tepat waktu. Untuk menghasilkan data yang berkualitas, handal, dan tepat waktu dalam informasi yang dihasilkan oleh OPD, inspektorat melakukan review/pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut. Proses review/pemeriksaan atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku yang sesuai dengan SAP sehingga meningkatkan kualitas laporan daerah itu sendiri.

Syarifudin (2014) menemukan bahwa peran auditor internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Semakin efektif peran auditor internal maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Suherman, dkk (2017), penelitian yang menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian Yuliani dkk (2010) menemukan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karena proses review/pemeriksaan atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

Maka keterkaitan antara pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.3 Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Menurut hasil analisis penelitian Roviyantje (2011), ditemukan bahwa setiap dilakukan peningkatan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi kepada aparatur pemerintah, khususnya pada pegawai pengelola keuangan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) tentang pengaruh sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintahan Kota Banda Aceh membuktikan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan Fransisca (2014) menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial variabel sistem informasi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Manado.

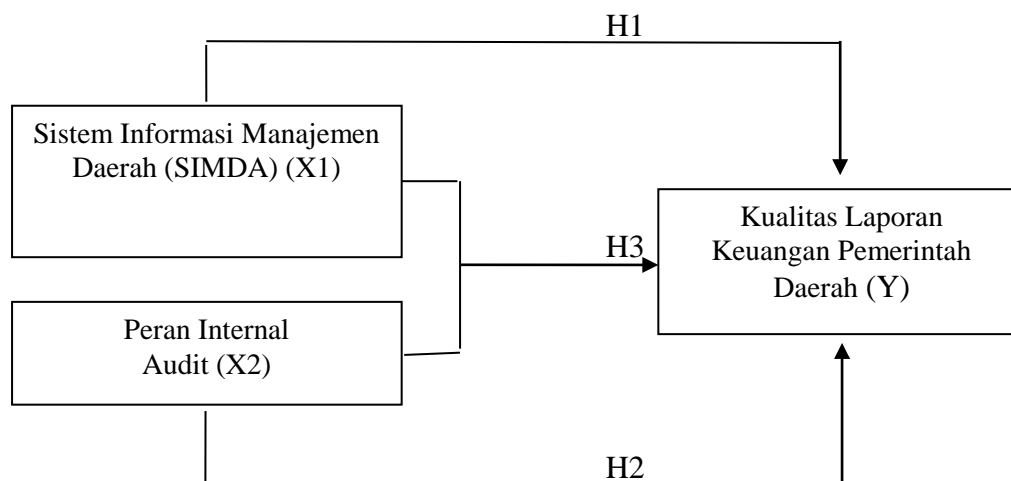
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka keterkaitan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah suatu tinjauan mengenai apa yang diteliti dan dituangkan dalam sebuah bagan yang menjadi alur pemikiran penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel independen yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) dan Peran Internal Audit (X2) terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Maka dalam penelitian ini dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, ditinjau dari tingkat ekplanasi penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2012;59) hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar variabel bebas

mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1), Peran Internal Audit (X2) dan sebagai variabel independen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebagai variabel dependen.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2010;115) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang menerima wewenang delegasi dan tanggung jawab untuk terlibat dalam penggunaan dana yang dianggarkan serta orang yang bertugas berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang terdapat pada 27 OPD Kota Sawahlunto.

Sampel menurut Sugiyono (2010;116) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Sampling Jenuh. Sugiyono (2011;85) menyatakan bahwa Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel, dengan menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Dalam penelitian ini menggunakan semua populasi sebagai sampel, dimana ada 27 OPD Kota Sawahlunto.

Sampel menurut Sugiyono (2010;116) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Sampling Jenuh. Sugiyono (2011;85) menyatakan bahwa Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel, dengan menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Dalam penelitian ini menggunakan semua populasi sebagai sampel, dimana ada 27 OPD yang masing-masing OPD terdiri dari 3 kategori yang dijadikan sampel, yaitu Kepala OPD, Kepala Sub Bagian (Kasubag)/Kasi OPD dan Bendahara OPD yang bertugas disetiap OPD se-Kota Sawahlunto.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk bilangan seperti agama, jenis kelamin dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner tertulis terdiri dari beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan topik penelitian. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber data, Sugiyono, (2011;137). Data primer tersebut didapatkan dari

hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada Bendahara OPD, Kepala Sub Bagian (Kasubag)/Kasi OPD dan Kepala OPD yang bertugas di setiap OPD se-Kota Sawahlunto.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang didalamnya terdapat beberapa pertanyaan seputar topik penelitian yang dibagikan kepada responden yang sudah ditentukan pada masing-masing OPD nya. Pengukuran kuesionernya dengan menggunakan skala likert 5 point yang terdiri dari:

STS (sangat tidak setuju) = 1

TS (tidak setuju) = 2

N (netral)= 3

S (setuju) = 4

SS (sangat setuju) = 5

Skala likert tidak di tentukan oleh berapa point, tapi lebih kepada ketepatan point pada setiap pertanyaan. Alasan pemilihan skala likert 5 point dalam pengukuran kuesioner penelitian ini adalah untuk memudahkan responden dalam mengisi pernyataan yang terdapat pada kuesioner sehingga jawaban nya lebih objektif dan tepat. Oleh karena itu peneliti menggunakan skala likert 5 point untuk melihat kecenderungan pendapat responden kearah setuju atau tidak setuju.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari Variabel Dependen (terikat) dan Variabel Independen (bebas).

- a. Variabel Dependen (terikat) Menurut Indriantoro dan Supomo (2014;63), variable dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
- b. Variabel Independen (bebas) Menurut Indriantoro dan Supomo (2014;63), variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (X1) dan Peran Internal Audit (X2).

3.5.2 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1
Variabel Penelitian, Definisi Operasional, Indikator, dan Skala Pengukuran

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1)	Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. <i>Sumber: Sutaruno, 2014</i>	a. Pencatatan b. Penggolongan c. Penafsiran d. Pelaporan <i>Sumber: PP No.18 Tahun 2013</i>	Likert

2	Peran Internal Audit (X2)	<p>Perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.</p> <p><i>Sumber:</i> <i>PP No.41 Tahun 2007</i></p>	<p>a. Pengawasan. b. Penilaian kinerja c. Review d. Tingkat obyektivitas auditor internal</p> <p><i>Sumber:</i> <i>Yuliani(2010)</i></p>	Likert
3	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	<p>Kualitas Laporan Keuangan adalah suatu laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya dan harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas serta berguna dalam pengambilan keputusan.</p> <p><i>Sumber:</i> <i>Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010</i></p>	<p>1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami</p> <p><i>Sumber:</i> <i>Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010</i></p>	Likert

3.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dengan desain risetnya menggunakan desain kausal, untuk memperkirakan secara kuantitatif

pengaruh dari beberapa variabel bebas secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan uji-uji diantaranya uji asumsi klasik, regresi linear berganda, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi.

3.6.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana akurasi dari alat pengukur untuk mengukur apa yang ingin diukur. Suatu alat ukur dapat dikatakan berhasil menjalankan fungsi ukurnya apabila dapat menunjukkan hasil ukurnya dengan cermat dan akurat. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, dapat dilihat dengan pengujian validitas instrumen menggunakan software statistik, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Pearson Product Moment*.

Pengujian ini menggunakan metode *Pearson Product Moment*, koefisien korelasi yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan r tabel dengan cara membandingkan r_{tabel} dengan r_{hitung} . Jika $|r_{hitung}| > |r_{tabel}|$ maka data dikatakan valid, dan sebaliknya jika $|r_{hitung}| < |r_{tabel}|$ maka data dikatakan tidak valid. Apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksinya signifikan pada level 0,05, Sugiyono (2012;133). Dalam uji validitas dilakukan perbandingan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dengan membandingkan r_{hitung} pada kolom *Pearson Product Moment* dengan r_{tabel} , dan dengan kontribusi signifikan pada level 0,05 atau 5% untuk *degree of freedom (df) = n-k*, dimana n adalah jumlah responden penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan kriteria tingkat kemantapan atau konsistensi suatu alat ukur (kuesioner). Suatu kuesioner dapat dikatakan mantap bila dalam pengukurannya secara berulang-ulang dapat memberikan hasil yang sama dengan catatan semua kondisi tidak berubah. Untuk uji reliabilitas, semakin dekat koefisien maka akan semakin baik. Keandalan konsistensi antar item atau koefisien dapat dilihat pada tabel *Cronbach Alpha*. Nilai reabilitas dinyatakan *reliable* jika mempunyai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan rumus *Cronbach Alpha (a)*. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan rumus *Cronbach Alpha (a)*. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden atas pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Instrumen dinyatakan reliabel apabila *Cronbach Alpha*

> 0,60. Jika *Cronbach Alpha* < 0,60 maka dikatakan tidak reliabel. Dan nilai karakteristik standar sebesar 0,60 sebagai batas penilaian pada *Cronbach Alpha*. Kriteria nilai tingkat keandalan *Cronbach Alpha* dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Klasifikasi Reliabilitas

Klasifikasi	Reliabilitas
0,8000 – 1,0000	Sangat tinggi
0,6000 – 0,7999	Tinggi
0,4000 – 0,5999	Cukup
0,2000 – 0,3999	Rendah
0,0000 – 0,1999	Sangat rendah

Sumber : Tedi Rusman (2013;57)

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Setelah data yang didapat dianggap valid dan reliabel, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Seluruh data yang sudah terkumpul ditabulasikan sesuai dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011;37) pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas penelitian ini menggunakan normal *P-P Plot*. Dasar pengambilan keputusan dalam penggunaan *P-P Plot* yaitu:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011;37), uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas, model

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Uji multikolinearitas ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* di atas ($>$) 0,10 dan nilai VIF di bawah ($<$) 10. Jika nilai *tolerance* $>$ 0,10 dan nilai VIF $<$ 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi. Jika nilai *tolerance* $<$ 0,10 dan nilai VIF $>$ 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, model yang baik ialah tidak terjadi heterokedastisitas. Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Pendeteksian mengenai ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di-studentized, Sujarweni (2014;186).

Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*. Regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan di bawah atau di sekitar angka nol, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak berpola, Sujarweni (2014;187)

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak diantara data-data pengamatan dapat dilihat nilai koefisien signifikannya, dalam hal ini ditetapkan $\alpha = 0,005$. Apabila koefisien signifikan lebih besar dari α (0,005), maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, Ghozali (2011;139).

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Alat uji yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda (*multiple regression*). Menurut Sugiyono (2012;192) analisis regresi linear berganda digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan atau diturunkan. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen digunakan model regresi berganda dikarenakan lebih dari satu variabel bebas dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana

:Y	=	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
a	=	Konstanta
b ₁ ,b ₂	=	Koefesien Regresi dari Variabel Independen
X ₁	=	Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
X ₂	=	Peran Internal Audit
e	=	Erorr

3.6.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji t (t-test)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat, Ghozali, (2012;44). Kriteria pengujian dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel sebagai berikut:

- Jika $| t_{hitung} | > | t_{tabel} |$ dan nilai signifikannya $< 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabe terikat.
- Jika $| t_{hitung} | < | t_{tabel} |$ dan nilai signifikannya $> 0,05$ artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel bebas.

2. Uji F (F-test)

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F-test. Menurut Ghozali (2011;98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai $|F_{hitung}| > |F_{tabel}|$ dan nilai signifikannya $< 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara X_1 , dan X_2 secara simultan terhadap Y .
- b. Jika nilai $|F_{hitung}| < |F_{tabel}|$ dan nilai signifikannya $> 0,05$ artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y .

3.6.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2011;97) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Nilai R^2 kecil dari satu berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Apabila teknik analisa datanya terdiri dari satu atau dua variabel bebas kita menggunakan R square, tetapi apabila jumlah variabel bebasnya lebih dari dua variabel maka akan lebih baik menggunakan adjusted R square yang nilainya selalu lebih kecil dari R square, Ghozali, (2011;97). Dalam penelitian ini pengujian koefisien determinasi menggunakan R square, karena variabel dalam penelitian ini memakai 2 variabel bebas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah kota Sawahlunto

Pertengahan abad ke-90, Sawahlunto hanyalah sebuah desa kecil dan terpencil, yang berlokasi ditengah-tengah hutan belantara, dengan jumlah penduduk ± 500 jiwa. Sebagian

besar penduduknya bertanam padi dan berladang di tanah dan lahan yang sebagian besar permukaan tanahnya tidak cocok untuk lahan pertanian sehingga Sawahlunto dianggap sebagai daerah yang tidak potensial. Setelah ditemukannya Batubara di Sawahlunto oleh geolog Belanda *Ir. W.H.De Grevet* tahun 1867, maka Sawahlunto menjadi pusat perhatian Belanda.

Batubara mengatarkan Sawahlunto sebagai catatan penting Pemerintahan India Belanda Pembukaan Tambang Batubara Sawahlunto tahun 1891 berupa asset terpenting bagi Pemerintahan Kolonial Belanda, Karena tingginya permintaan dunia akan batubara sebagai sumber *energy* di abad penemuan Mesin Uap di Eropa Barat. Apalagi cadangan deposit Batubara Sawahlunto di perkirakan mencapai angka 205 juta Ton. Cadangan batubara itu tersebar diantaranya Daerah Perambahan, Sikalang, Sungai Durian, Sigalui, Padang Sibusung, Lurah Gadang, dan Tanjung Ampalu.

Usaha penambangan ini mencapai kejayaannya pada tahun 1920-1921, Pada Waktu itu jumlah pekerja mencapai ribuan orang, Selain itu ada hampir seratus orang Belanda atau Indo yang menjadi Pimpinan Perusahaan, Ahli dan Staf kunci lainnya. Sejumlah Pekerjaan itu menimbulkan terjadinya konsentrasi penduduk, Karena selain membawa keluarga juga mengundang pendatang. Sehingga terciptalah kegiatan perekonomian yang berkaitan dengan usaha pelayanan seperti tukang cuci, tukang cukur, pelayanan kesehatan, pemilik dan pekerja warung, penjual barang keperluan keluarga dan sebagainya.

Terlebih lagi pihak Perusahaan Tambang mencoba memberikan pelayanan yang sebaiknya agar pekerjaannya betah tinggal di kota yang relatif terisolasi pada waktu itu, Dengan menyelenggarakan hiburan, fasilitas Pendidikan, Rumah Sakit yang memadai, bahkan pasar malam yang dilaksanakan secara rutin. Ditambah dengan keberadaan orang Belanda dengan fasilitasnya yang eksklusif, menjadikan Sawahlunto menjadi alasan yang kuat untuk menetapkan Sawahlunto menjadi Kota yang mempunyai administrasi sendiri atau hak desentralisasi dengan status *Gementee* berdasarkan *Stadsblaad Van Nederlandsch Indie* pada tahun 1918. Penyelenggaraan Kota dilakukan oleh *Stadesgemeenteraad* (DPRD) dan *Burgemeester* (Walikota)

Pada zaman kemerdekaan pemerintah *Gementee* itu diatur Presiden Sumatera Barat

Nomor 20 dan 21 Tahun 1946 tentang Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Daerah. Pada tanggal 10 Maret 1949 diadakan rapat dengan hasilnya pusat pemerintahan *Afdealing* solok yang dahulunya berada di Sawahlunto dibagi menjadi Kabupaten/ Sawahlunto Sijunjung dan kabupaten Solok. Maka Pemerintahan *stand gameeente* Sawahlunto dirangkap oleh Bupati Sawahlunto/ Sijunjung. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 status Sawahlunto merubah menjadi Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri dengan sebutan Kotamadya Sawahlunto dengan walikota Pertama Achmad Noerdin, SH terhitung mulai 11 Juni 1965 melalui surat keputusan menteri dalam negeri No Up.15/2/13-227 tanggal 8 Maret 1965.

Seiring Perkembangan Wilayah dari kependudukan di kotamadya Sawahlunto dikeluarkan Peraturan Pemerintahan No 44 Tahun 1990 Tentang perubahan batas wilayah Kotamadya daerah tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan kabupaten daerah tingkat II Solok, Dimana batas wilayah kotamadya Dati II Sawahlunto diperluas meliputi seluruh wilayah kecamatan Talawi Kabupaten Dari Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri dari 17 Desa, sebagian wilayah Kecamatan Sawahlunto Kabupaten daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung terdiri dari 11 Desa dan sebagian wilayah Kecamatan X Koto di atas Kabupaten Daerah tingkat II Solok terdiri dari 11 Desa.

Setelah lebih satu Abad lamanya Batubara sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui itu kian menipis dan tidak lagi memberikan harapan sepenuhnya seperti masa lalu. Bagi Kehidupan Kota dan Penduduk Kota, Kota Sawahlunto terancam menjadi kota mati, Tapi kehidupan Kota dengan segala pendukungnya mesti terus berlanjut. Alternatif diperlukan sebagai jalan keluar terhadap pemecahan masalah tersebut. Pamor Kota Sawahlunto sebagai Kota permbangan batubarapun mulai memudar seiring dengan semakin menipisnya deposit batubara/*openpin*.

Berdasarkan Kondisi tersebut diatas Pemerintahan Kota bersama *stakeholder* Kota terus mencari alternatif lain sehingga Kota Sawahlunto tidak menjadi Kota Mati. Kota Sawahlunto menolak untuk menjadi sekedar Kota Kenangan. Pemerintahan beserta elemen masyarakat Kota Sawahlunto, Telah merancang strategi lain yaitu dengan menjadikan Kota Sawahlunto menjadikan Kota Wisata dengan menonjolkan dua Potensi Wisata yang menjadi kekuatannya, Wisata Tambang dan Wisata Sejarah Kota Lama.

Dengan memanfaatkan bekas tambang serta peninggalan bangunan belanda yang banyak di Sawahlunto menjadikan Kota sawahlunto menjadi Kota yang unik karena itu segenap jajaran Pemerinttahan Kota dan DPRD bersama *stakeholder* merumuskan Visi Kota Sawahlunto yang ditunjukkan dalam Peraturan Daerah Kota sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 yaitu “Kota Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya”. Maka semejak ditetapkan Visi Kota tersebut maka Selanjutnya Prioritas pembangunan di Kota Sawahlunto mengarah pada pengembangan keparawisataan dengan Misi dan Rencana strategi pengembangan Parawisata yang menjadi Kota sawahlunto menjadi salah satu Destinasi Wisata Provinsi Sumatera barat.

4.1.1 Kondisi Geografis dan Adminsitratif

Secara Geografis luas Wilayah Kota Sawahlunto adalah 27.345 Ha (273,45 km²) atau sekitar 0,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat dengan jarak ke Ibukota Provinsi (Padang) adalah 94 km dan dapat ditempuh melalui jalan darat dalam waktu lebih kurang 2 (dua) jam dengan kendaraan roda 4 (empat). Dari luas Wilayah tersebut secara administratif Kota Sawahlunto memili 4 kecamatan yang terdiri dari 10 kelurahan dan 27 Desa. Dari Luas Wilayahnya, yang terluas yakni Kecamatan Talawi dengan luas 9.939 Ha, dan disusun Kecamatan Barangin dengan luas 8.855 Ha, Kecamatan Lembah Segar dengan luas 5.258 Ha dan Kecamatan Silungkang dengan luas 3.293 Ha. Adapun luas masing-masing Kecamatan Berikut Kelurahan Desa di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1**Luas Wilayah Kota Sawahlunto Menurut Kecamatan dan Kelurahan**

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)
1	LEMBAH SEGAR	1. Kel. Pasar	0.050
		2. Kel. Kubang Sirakuk Utara	0.028
		3. Kel. Kubang Sirakuk Selatan	0.027
		4. Kel. Aur Mulyo	0.020
		5. Kel. Tanah Lapang	0.016
		6. Kel. Air Dingin	0.014
		7. Desa Lunto Barat	0.511
		8. Desa Lunto Timur	0.489
		9. Desa Pasar Kubang	0.932
		10. Desa Kubang Tengah	2.015
		11. Desa Kubang Utara Sikabu	1.156
TOTAL			5.258
2	BARANGIN	1. Kel. Saringan	0.081
		2. Kel. Lubang Panjang	0.100
		3. Kel. Durian I	0.117
		4. Kel. Durian II	0.125
		5. Desa Talago Gunung	1.730
		6. Desa Lumindai	2.010
		7. Desa Balai Batu Sandaran	1.295
		8. Desa Santur	0.869
		9. Desa Kolok Mudik	0.852
		10. Desa Kolok Nan Tuo	1.676
TOTAL			8.855
3	TALAWI	1. Desa Sikalang	0.659
		2. Desa Rantih	0.622
		3. Desa Salak	0.660
		4. Desa Sijantang Koto	0.640
		5. Desa Talawi Hilir	1.021
		6. Desa Talawi Mudik	0.876
		7. Desa Bukik Gadang	0.774
		8. Desa Batu Tanjung	1.590

		9. Desa Kumbayau	0.836
		10. Desa Data Mansiang	0.629
		11. Desa Tumpuk Tengah	1.632
TOTAL			9.939
4	SILUNGKANG	1. Desa Muara Kalaban	0.858
		2. Desa Silungkang Oso	0.657
		3. Desa Silungkang Duo	0.422
		4. Desa Silungkang Tigo	0.513
		5. Desa Tarantak Bancah	0.843
TOTAL			3.293
TOTAL LUAS KOTA SAWAHLUNTO			27.345

Sumber: BAPPEDA Kota Sawahlunto

Secara Geografis Kota Sawahlunto terletak di daerah perbukitan dengan posisi terletak diantara 100.41 dan 100.49 bujur timur, 0.34 – 0.46 lintang selatan. Sedangkan batas wilayah Kota Sawahlunto dilihat dari letak administrasi berbatas dengan :

1. Sebalah Utara : Berbatasan dengan Kab. Tanah Datar
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Solok
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Sijunjung
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kab. Solok

4.1.2 Sosial Budaya

Secara umum kondisi sosial budaya masyarakat Kota Sawahlunto sangat kondusif, hal ini terlihat dari harmonisnya kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang didukung penuh oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan program-program yang tepat sasaran, serta bermanfaat dibidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, keberdayaan pemuda dan olahraga, meningkatkan sumber aparatur tenaga pendidikan, meningkatkan alokasi dana untuk

pendidikan dan lain sebagainya.

Khususnya didalam hal pembangunan agama di Kota Sawahlunto sampai saat ini telah berjalan dengan baik dengan fokus perhatian pada peningkatan kualitas beragama. Namun peningkatan pada berbagai demensi beragama masih diperlukan baik dari sisi pengetahuan beragama tidak saja dikembangkan pada dimensi ibadah yang memberikan dampak sosial yang benar, misalnya mengembangkan praktek zakat, infak dan sedekah.

4.1.3 Arti Lambang Daerah

1. Lambang berbentuk perisai dah perjuangan dan pertahanan.
2. Lingkaran berbentuk segi lima beraturan merupakan kembang melati yang berarti :
 - a. 5 (lima) sudut segi lima adalah Pancasila.
 - b. Kembang melati adalah lambang Kepamong Prajaan.
3. Atap rumah adat mingkabau bergonjong empat yang terletak pada sebelah atas lingkaran segi lima menggambarkan geografi kebudayaan Sawahlunto yang terletak dialam Minangkabau.
4. 19 (Sembilan belas) berkas sinar matahari, 3 (tiga) gulungan awan, 5 (lima) cerobong asap dan 6 (enam) puncak pablik yang berarti tanggal 19 bulan 3 tahun 1965 yang merupakan tanggal berdirinya Sawahlunto.
5. Yang terdiri dari :
 - a. Matahari berarti lambing ketimuran.
 - b. Sinar berarti manfaat yang diberikan oleh Sawahlunto dengan produksi ke semua penjuru.
6. Rantai adalah lambing persatuan dan kesatuan yang berarti bahwa Kota Sawahlunto yang penduduknya tardidik dari banyak suku bangsa, agama, adat istiadat dan sebagainya tetapi tetap bersatu.
7. Penjelasan warna
 - a. Warna kuning yang terdapat pada matahari adalah lambing kesejahteraan/keagamaan.

- b. Warna biru pada dasar lambang adalah lambang ketenangan, ketabahan dan kesadaran.
- c. Warna hijau pada lapisan bukit sebelah luar adalah lambang kesuburan.
- d. Warna putih pada lapisan bukit sebelah dalam adalah lambang keadilan dan kekokohan dalam pendirian.
- e. Keseluruhan warna melambangkan keharmonisan dalam pergaulan masyarakat dalam daerah Kota Sawahlunto.

4.1.4 Pemerintahan dan Peningkatan Kapasitas

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota kecil di Provinsi Sumatera Barat yang sudah ada sejak zaman Belanda dengan dibukanya tambang batubara oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kota Sawahlunto secara administrasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom kota kecil Dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Solok, Maka Kota Sawahlunto sebagai wilayah administratif dan 27 Desa yang dipimpin oleh Lurah/Kepala Desa.

Disamping Wilayah administrative pemerintahan Desa/Kelurahan, terdapat juga wilayah berupa Kenagarian sebanyak 10 Nagari. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh 2.662 orang Pegawai Negeri Sipil yang terbesar pada 27 OPD di Kota Sawahlunto yang sebagian besar berpendidikan sarjana yaitu sebanyak 1.473 orang (56%), dan yang sudah berpendidikan Magister (S2) sebanyak 166 orang (7%), Sedangkan yang berpendidikan terendah SD sebanyak 17 orang (0,01%).

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan penataan organisasi perangkat daerah. Pada tahun 2014 terjadi perubahan pada struktur Organisasi dan Tata Kerja jajaran Pemerintah Kota Sawahlunto yaitu peningkatan status Kantor Kepegawaian Daerah (KKD) yang dipimpin oleh pejabat setingkat Esilon III.a menjadi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang dipimpin oleh pejabat setingkat Esilon II.a berdasarkan pada perda Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013.

Penataan Organisasi perangkat daerah yang dilakukan juga dilaksanakan peningkatan kapasitas dalam mengembangkan dan penyempurnaan sistem kedepannya semakin baik dan sempurna dalam hal pelayanan, perencanaan, penganggaran dan sistem pengawasan, begitu juga sistem pelaksanaan kinerja sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur secara terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto bagi Aparatur Pemerintah dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengikuti beberapa kegiatan melalui lembaga-lembaga diklat, magang studi banding dan sebagainya, disisi lain peningkatan kapasitas warga/rakyat dapat dilihat dalam peran aktif lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada yakni pembangunan manusia di Kota Sawahlunto.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang menerima wewenang delegasi dan tanggung jawab untuk terlibat dalam penggunaan dana yang dianggarkan serta orang yang bertugas berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang terdapat pada 27 OPD Kota Sawahlunto. Yang terdiri dari Kepala OPD, Kepala Sub Bagian (Kasubag)/Kasi Keuangan OPD dan Bendahara OPD Kota Sawahlunto. Kuesioner yang disebar sebanyak 81 kuesioner, sedangkan kuesioner yang kembali sebanyak 49 kuesioner, dan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 22 kuesioner. Berikut rincian responden yang terdapat pada tiap-tiap OPD Kota Sawahlunto dalam penelitian ini:

Tabel 4.2
Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase (%)
Jumlah kuesioner yang disebar	81	100%

Jumlah kuesioner yang tidak kembali	32	39,51%
Jumlah kuesioner yang diterima	49	60,49%
Jumlah kuesioner yang tidak lengkap	0	0%
Kuesioner yang diolah (<i>Respond Rate</i>)	49	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Dari 81 kuesioner yang telah disebar, terdapat 49 kuesioner yang kembali dan 32 kuesioner yang tidak kembali. Kuesioner yang tidak kembali diakibatkan karena ketidakhadiran responden yang bersangkutan berhubung tengah melaksanakan Dinas Luar (DL), cuti dan izin. Faktor lain karena keterbatasan waktu pada saat pengisian kuesioner tidak bisa mendampingi responden mengisi kuesioner yang telah peneliti berikan dan pada saat penjemputan kuesioner ada yang hilang dan tidak sesuai dengan jumlah yang diberikan. Sehingga berdasarkan dari data yang telah terkumpul dan yang telah diperiksa maka data yang diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 49 dari 81 kuesioner yang telah disebar atau tingkat respond yang kembali sebesar 100 %.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden

Klasifikasi	Jumlah	Persentase %
Jenis kelamin		
Laki-laki	16	32%
Perempuan	33	68%
Jumlah	49	100%
Pendidikan		
SMA	5	10%
D3	15	30%
S1	19	40%
S2	10	20%
Jumlah	49	100%

Sumber : Data Primer yang diolah 2019

Karakteristik responden dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan. Dalam kuesioner tidak perlu mencantumkan identitas pribadi atau nama untuk kerahasiaan informasi yang diberikan responden tersebut, dapat dilihat dari tabel 4.3 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dari 49 responden terdapat sebanyak 16 orang laki-laki (32%) sedangkan 33 orang (68%) adalah responden perempuan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komposisi responden penelitian ini didominasi oleh responden perempuan.
2. Dari 49 responden sebanyak 5 orang (10%) tamatan SMA, 15 orang (30%) tamatan D3, 19 orang (40%) tamatan S1 dan 10 orang (20%) tamatan S2. Dengan demikian responden didominasi dengan responden yang tamatan S1.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana akurasi dari alat pengukur untuk mengukur apa yang ingin diukur. Suatu alat ukur dapat dikatakan berhasil menjalankan fungsi ukurnya apabila dapat menunjukkan hasil ukurnya dengan cermat dan akurat. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, dapat dilihat dengan pengujian validitas instrumen menggunakan software statistik, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Pearson Product Moment*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid.

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1)

Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Proses pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah dapat berperan sebagai sumber informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah.

Terdapat 10 pertanyaan untuk variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1), dan dari ke-10 pertanyaan tersebut didapat hasil semuanya valid. Sehingga dapat disimpulkan 10 pertanyaan tersebut layak digunakan dan dapat dianalisis lebih lanjut. Untuk mengetahui validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1)

	Pearson Product Moment	r tabel	Keterangan
X1.1	0,941	0,281	Valid
X1.2	0,941	0,281	Valid
X1.3	0,941	0,281	Valid
X1.4	0,941	0,281	Valid
X1.5	0,349	0,281	Valid
X1.6	0,283	0,281	Valid
X1.7	0,511	0,281	Valid
X1.8	0,392	0,281	Valid
X1.9	0,383	0,281	Valid
X1.10	0,941	0,281	Valid

Sumber: Data diolah,2019

Dalam uji validitas diatas dilakukan perbandingan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dengan membandingkan r_{hitung} pada kolom *Pearson Product Moment* dengan r_{tabel} , dan dengan kontribusi signifikan pada level 0,05 atau 5% untuk *degree of freedom (df) = n-k*, dimana n adalah jumlah responden penelitian sebanyak 49 responden diperoleh nilai $(df) = 49-2 = 47$, sehingga didapat nilai r_{tabel} sebesar 0,281. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut valid, dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid.

Berdasarkan tabel 4.4 sistem informasi manajemen daerah (X1) dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 item pertanyaan yang dikatakan valid X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6, X1.7, X1.8, X1.9, X1.10 dimana r_{hitung} masing-masing item pertanyaan lebih besar

dari r_{tabel} . Dan pada Tabel 4.4 menunjukkan nilai ke-6 butir pertanyaan untuk variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebesar 0,283 untuk koefisien korelasi terendah dan 0,941 untuk koefisien korelasi tertinggi.

Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,281, yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengukur variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

2. Peran Internal Audit (X2)

Peran Internal Audit merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota. Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah mereview laporan keuangan pemerintah daerah (OPD). Dengan adanya pengawasan dari inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan berkualitas.

Audit Internal merupakan suatu kegiatan untuk menilai secara bebas (independen) atas kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi guna memenuhi kebutuhan pihak manajemen dengan cara memberikan analisis, penilaian, komentar dan rekomendasi untuk kemajuan perusahaan, dimana tujuan utama dari inspektorat adalah membantu Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Dalam uji validitas dibawah dilakukan perbandingan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dengan membandingkan r_{hitung} pada kolom *Pearson Product Moment* dengan r_{tabel} , dan dengan kontribusi signifikan pada level 0,05 atau 5% untuk *degree of freedom (df) = n-k*, dimana n adalah jumlah responden penelitian sebanyak 49 responden diperoleh nilai $(df) = 49-2 = 47$, sehingga didapat nilai r_{tabel} sebesar 0,281. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut valid, dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Pengendalian Internal Audit (X2)

	Pearson Correlation	r tabel	Keterangan
X2.1	0,727	0,281	Valid
X2.2	0,443	0,281	Valid
X2.3	0,664	0,281	Valid
X2.4	0,611	0,281	Valid
X2.5	0,389	0,281	Valid
X2.6	0,586	0,281	Valid
X2.7	0,434	0,281	Valid
X2.8	0,611	0,281	Valid
X2.9	0,389	0,281	Valid
X2.10	0,586	0,281	Valid
X2.11	0,586	0,281	Valid
X2.12	0,434	0,281	Valid
X2.13	0,434	0,281	Valid
X2.14	0,727	0,281	Valid
X2.15	0,727	0,281	Valid

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 Peran Internal Audit (X2) dapat disimpulkan bahwa terdapat 15 item pertanyaan yang dikatakan valid X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6, X2.7, X2.8, X2.9, X2.10, X2.11, X2.12, X2.13, X2.14, dan X2.15 dimana r_{hitung} masing-masing item pertanyaan lebih besar dari r_{tabel} . Dan pada Tabel 4.5 menunjukkan nilai ke-5 dan 9 butir pertanyaan untuk variabel Peran Internal Audit sebesar 0,389 untuk koefisien korelasi terendah dan 0,727 untuk koefisien korelasi tertinggi. Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,281), yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat

dianalisis lebih lanjut untuk mengukur variabel Peran Internal Audit.

3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Y)

Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Melalui sistem pengendalian internal upaya untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih di pacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Dalam uji validitas dibawah dapat diketahui bahwa ada 13 item pertanyaan yang dinyatakan valid yaitu : Y.1, Y.2, Y.3, Y.4, Y.5, Y.6, Y.7, Y.8, Y.9, Y.10, Y.11, Y.12, Y.13 dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$. Pada kolom *Pearson Correlation* dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan diatas besar dari 0,281 dan dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,281). Dalam uji validitas dilakukan perbandingan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dengan membandingkan r_{hitung} pada kolom *Pearson Product Moment* dengan r_{tabel} , dan dengan kontribusi signifikan pada level 0,05 atau 5% untuk *degree of freedom (df) = n-2*, dimana n adalah jumlah responden penelitian sebanyak 49 responden diperoleh nilai $(df) = 49-2 = 47$, sehingga didapat nilai r_{tabel} sebesar 0,281. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut valid, dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

	Pearson Correlation	r tabel	Keterangan
Y1	0,547	0,281	Valid
Y2	0,479	0,281	Valid
Y3	0,683	0,281	Valid
Y4	0,674	0,281	Valid
Y5	0,415	0,281	Valid
Y6	0,600	0,281	Valid
Y7	0,482	0,281	Valid
Y8	0,674	0,281	Valid
Y9	0,415	0,281	Valid
Y10	0,600	0,281	Valid
Y11	0,600	0,281	Valid
Y12	0,482	0,281	Valid
Y13	0,482	0,281	Valid

Sumber: Data diolah, 2019

Dan pada Tabel 4.6 menunjukkan nilai ke-5 dan 9 butir pertanyaan untuk variabel Peran Internal Audit sebesar 0,415 untuk koefisien korelasi terendah dan 0,683 untuk koefisien korelasi tertinggi. Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,281, yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengukur variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Peran Internal Audit.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas, semakin dekat koefisien maka akan semakin baik. Keandalan konsistensi antar item atau koefisien dapat dilihat pada tabel *Cronbach Alpha*. Nilai reabilitas dinyatakan *reliable* jika mempunyai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan rumus *Alpha Cronbach (a)*.

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1)

Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan SPSS dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden atas pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Instrumen dinyatakan reliabel apabila *Cronbach Alpha* $> 0,60$. Untuk mengetahui reliabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Reliability Statistics
Variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1)

Cronbach's Alpha	N of Items	Karakteristik Standar	Keterangan
0,867	10	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) *Cronbach Alpha* bernilai $0,867 > 0,60$. Klasifikasi reabilitas termasuk dalam klasifikasi sangat tinggi, karena nilai *Cronbach Alpha* berada diantara $0,8000-1,0000$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menunjukkan hasil yang reliabel sangat tinggi sehingga dapat dikatakan semua item-item pertanyaan masing-masing variabel dari kuesioner tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dan dapat dilakukan lebih lanjut.

2. Peran Internal Audit (X2)

Untuk menguji reliabilitas dalam penelitaian ini digunakan SPSS dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden atas pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Instrumen dinyatakan reliabel apabila *Cronbach Alpha* > 0,60. Untuk mengetahui reliabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Reliability Statistics
Variabel Peran Internal Audit (X2)

Cronbach's Alpha	N of Items	Karakteristik Standar	Keterangan
0,847	15	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa variabel pengendalian internal (X2) *Cronbach Alpha* bernilai 0,847 > 0,60. Klasifikasi reabilitas termasuk dalam klasifikasi sangat tinggi, karena nilai *Cronbach Alpha* berada diantara 0,8000-1,0000. Dapat disimpulkan bahwa variabel peran internal audit menunjukkan hasil yang reliabel sangat tinggi sehingga dapat dikatakan semua item-item pertanyaan masing-masing variabel dari kuesioner tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dan dapat dilakukan lebih lanjut.

3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Untuk menguji reliabilitas dalam penelitaian ini digunakan SPSS dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden atas pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Instrumen dinyatakan reliabel apabila *Cronbach Alpha* > 0,60. Untuk mengetahui reliabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Reliability Statistics
Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items	Karakteristik Standar	Keterangan
0,808	13	0,60	Realiabel

Sumber: Data diolah, 2019

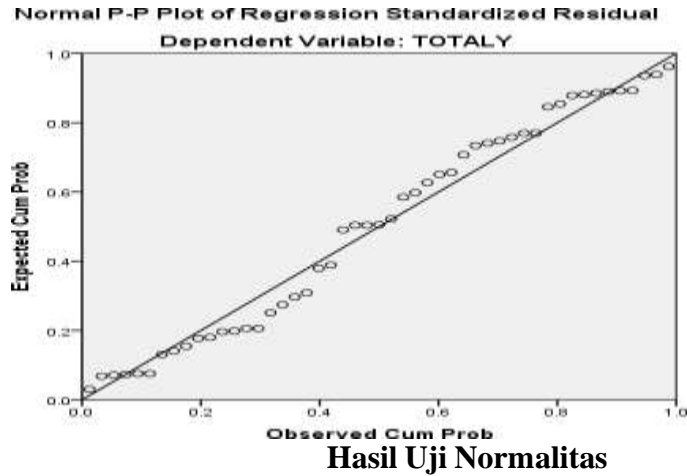
Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa variabel Pencegahan Kecurangan (Y) *Cronbach Alpha* bernilai $0,808 > 0,60$. Klasifikasi reabilitas termasuk dalam klasifikasi sangat tinggi, karena nilai *Cronbach Alpha* berada diantara 0,8000-1,0000. Dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan hasil yang reliabel sangat tinggi, sehingga dapat dikatakan semua item-item pertanyaan masing-masing variabel dari kuesioner tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dan dapat dilakukan lebih lanjut.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dalam kajian penelitian ini menggunakan normal *P-P Plot*. Apabila grafik yang diperoleh dari output titik-titiknya mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Lebih jelasnya hasil uji normalitas data dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1



Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan gambar 4.10 di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal dan tidak membentuk garis lain. Dapat disimpulkan variabel independen yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1), dan Peran Internal Audit (X2) menyebar dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga data variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)(X1), dan Peran Internal Audit (X2) memenuhi uji normalitas dan penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji asumsi multikolonieritas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan linear antar variabel bebas (*independent*) satu dengan variabel bebas (*independent*) yang lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)(X1), dan Peran Internal Audit (X2). Nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi ($VIF = 1/ Tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan adalah nilai *Tolerance* > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10, hal ini berarti tidak ada multikolonieritas antar variabel dalam model regresi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sitem Informasi Manajemen Daerah (X1)	0.999	1.001
Peran Internal Audit (X2)	0.999	1.001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : data diolah menggunakan SPSS Versi 22.0 (2019)

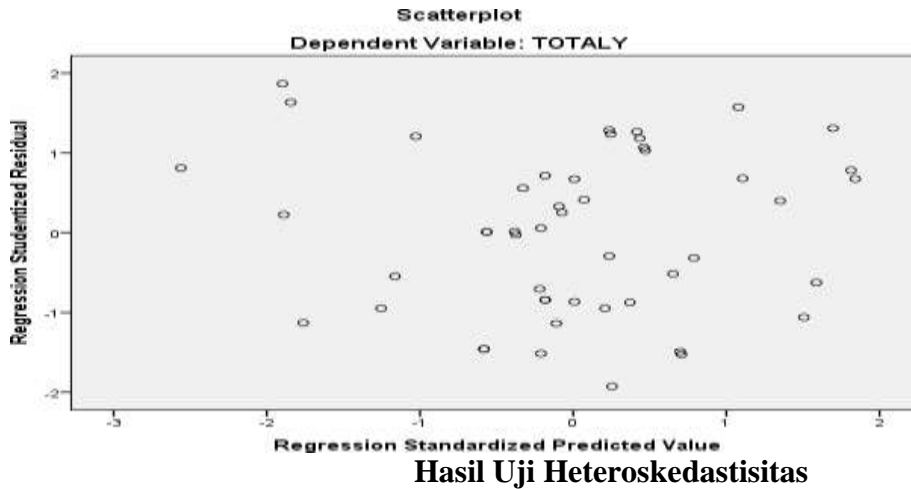
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa *Tolerance* variabel independen Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) adalah 0,999, dan nilai VIF = 1,001. Nilai *Tolerance* untuk variabel. Nilai *Tolerance* untuk variabel Peran Internal Audit (X2) adalah 0,999, dan nilai VIF = 1,001. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antar variabel independen dalam regresi, karena nilai VIF variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1), dan Peran Internal Audit (X2) kurang dari 10 ($VIF < 10$) dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 ($Tolerance > 0,1$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah(SIMDA) (X1), dan Peran Internal Audit (X2) dalam regresi yang dibentuk sehingga penelitian ini dapat untuk diteliti lebih lanjut.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dalam residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam penelian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan analisa grafik plot antara nilai

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Adapun cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.2



Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, tidak berkumpul disatu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas dalam artian bahwa varian semua variabel ini menunjukkan variabel indenpen yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) dan Peran Internal Audit (X2) dapat digunakan untuk Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Sehingga penelitian ini dapat untuk diteliti lebih lanjut.

4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan atau diturunkan. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan model regresi berganda dikarenakan lebih dari satu variabel bebas . Dalam hal penelitian ini, analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1), dan Peran Internal Audit (X2) terhadap variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Berdasarkan tabel 4.11 dibawah, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,785 + 0,049 X1 + 0,797 X2$$

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengetahui nilai persamaan regresi dan nilai koefisien korelasi dipergunakan data pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	2,785	2,131	
Sitem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1)	0,049	0,037	0,045
Peran Internal Audit (X2)	0,797	0,028	0,971

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : data diolah menggunakan SPSS Versi 22.0 (2018)

Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Persamaan regresi berganda diatas diketahui Konstanta bernilai sebesar 2,785. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) dan Peran Internal Audit (X2) sama dengan nol, maka nilai variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 2,785 satuan.
2. Nilai koefisien Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) bernilai sebesar 0,049. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) dinaikkan satu satuan dengan asumsi Peran Internal Audit (X2) bernilai tetap atau nol, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan naik sebesar 0,049 satuan.
3. Nilai koefisien Peran Internal Audit (X2) bernilai sebesar 0,797. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai Peran Internal Audit (X2) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) bernilai tetap atau nol, maka nilai dari Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan naik sebesar 0,797.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Pengujian Hipotesis secara Parsial (uji t)

Uji statistik t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) dan Peran Internal Audit (X2) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Uji t dilakukan dengan ketentuan jika nilai signifikan $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikan $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,785	2,131		1,307	0,198
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	0,049	0,037	0,045	1,339	0,187
Peran Internal Audit	0,797	0,028	0,971	28,811	0,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : data diolah menggunakan SPSS Versi 22.0 (2019)

1. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ dan nilai signifikan $< 0,05$. Dari tabel diatas Nilai t_{hitung} sebesar 1,339 lebih kecil dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 1,678, maka $1,339 < 1,678$ dan nilai probabilitas tidak signifikan sebesar $(0,187 > 0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X_1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Sehingga dapat dijelaskan bahwa Hipotesis pertama (H_1) ditolak.

2. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ dan nilai signifikan $< 0,05$. Nilai t_{hitung} sebesar 28,811 lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 1,678, maka $28,811 > 1,678$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,000 < 0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa Peran Internal Audit (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Sehingga dapat dijelaskan bahwa Hipotesis Kedua (H_2) diterima.

4.6.2 Pengujian Hipotesis secara Simultan (uji F)

Untuk mengetahui bahwa variabel independen yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1), dan Peran Internal Audit (X2) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dapat dilihat pada uji F berikut ini:

Tabel 4.13
Hasil Uji Simultan (uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1444,094	2	722,047	417,369	.000 ^b
Residual	79,580	46	1,730		
Total	1523,673	48			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Peran Internal Audit, SIMDA

Sumber : data diolah menggunakan SPSS 22.0 (2019)

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Hipotesis diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig $< 0,05$. Nilai F_{tabel} pada signifikan 0,05 adalah 3,29. Dari uji ANOVA (*Analysis of varians*) atau uji F diatas, menunjukkan bahwa F_{hitung} besar dari F_{tabel} ($417,369 > 3,29$) dan nilai signifikan sebesar ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) dan Peran Internal Audit (X2) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Sehingga dapat dijelaskan bahwa Hipotesis ketiga (H_3) diterima.

4.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi yang biasanya diberi simbol R^2 menunjukkan hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen dan hasil

perhitungan tertentu. Nilai determinasi ditentukan dengan nilai *R Square* merupakan untuk regresi dengan variabel bebasnya dari satu atau dua maka digunakan *R Square* sebagai koefisien determinasi. Sedangkan untuk lebih dari dua variabel memakai *Adjusted R Square*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefesien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,974 ^a	0,948	0,946	1,315

- a. Predictors: (Constant), Peran Internal Audit, SIMDA
- b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : data diolah menggunakan SPSS 22.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat dilihat bahwa nilai *R Square* sebesar 0,948 Hal ini mengandung arti bahwa variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1), dan Peran Internal Audit (X2) adalah sebesar 94,8% Sedangkan sisanya sebesar 5,2% disumbangkan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti pemahaman akuntansi, sistem pengendalian internal dan pengalaman kerja.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

4.8.1 Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang pertama bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,339 lebih kecil dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 1,678, maka $1,339 < 1,678$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,187 < 0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak karena Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun sebenarnya dalam menentukan

kualitas suatu laporan keuangan terletak pada saling ketergantungan yang membuat sesuatu yang berkualitas.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ulfiati (2017) dan Adi Kuncoro (2017) yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hal ini disebabkan karena responden yang ikut serta belum bisa memahami Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan baik dan pengisian kuesioner yang asal-asalan. Dan karena pengguna atau pemakai dari sistem akuntansi yang dapat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), sedangkan OPD selain dari BPKAD cuma menjalankan aplikasi dan tidak betul-betul memahami standar akuntansi pemerintah itu sendiri kecuali perangkat bagian keuangan yang telah mendapatkan pelatihan tentang standar akuntansi pemerintah.

4.8.2 Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian mendukung hipotesis yang kedua bahwa Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 28,811 lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 1,678, maka $28,811 > 1,678$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,000 < 0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) dapat diterima bahwa Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sefrida Yuliani (2010) yang menyatakan bahwa Peran Internal Audit berpengaruh dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan semakin baik Peran Internal Audit maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Sawahlunto. Semakin besar peran internal audit yang dilakukan secara efektif dan efisien maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Sawahlunto.

4.8.3 Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini yaitu Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Hipotesis diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $sig < 0,05$. Nilai F_{tabel} pada signifikan 0,05 adalah 3,29. Dari uji ANOVA (*Analysis of varians*) atau uji F diatas, menunjukkan bahwa F_{hitung} besar dari F_{tabel} ($417,369 > 3,29$) dan nilai signifikan sebesar ($0,000 < 0,05$). Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1) dan Peran Internal Audit (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Sehingga dapat dijelaskan bahwa Hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Apabila semua unsur pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan dilaksanakan dalam pembuatan laporan keuangan maka laporan yang dihasilkan akan baik dan berkualitas. Pemanfaatan terhadap sistem informasi akuntansi juga perlu dimanfaatkan dengan baik. Sehingga sistem tersebut dapat menghasilkan informasi yang akurat dan baik guna menghasilkan laporan keuangan yang berkuaitas. Hasil penelitian ini didukung oleh Sefrida Yulian (2010) yang menyatakan bahwa secara simultan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada penelitian ini hanya sebagai variabel independen tidak sebagai variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan pengujian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah memiliki hubungan yang positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Hal tersebut terjadi disebabkan kurangnya responden dan pengisian kuesioner yang sembarangan, karena penerapannya belum efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap kurangnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Internal Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat Peran Internal Audit maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa sistem informasi manajemen daerah dan peran internal audit secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Sehingga dapat dijelaskan bahwa Hipotesis ketiga diterima. Artinya perubahan yang terjadi pada sistem informasi manajemen daerah dan peran internal audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Peran Internal Audit mempunyai sumbangan pengaruh sebesar 94,8% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sisanya 5,2% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti pemahaman akuntansi, sistem pengendalian internal dan pengalaman kerja.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari judul penelitian ini diharapkan pemerintah daerah Kota Sawahlunto mampu meningkatkan kualitas laporannya dengan peningkatan pemahaman

pegawai terhadap sistem informasi manajemen daerah yang didukung dengan peran internal audit yang tentunya harus dengan kompetensi sumber daya manusia yang baik, dimana kompetensi sumber daya manusia mencakup tingkat pendidikan, pemahaman, dan pengalaman.

2. Pegawai keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi akan lebih baik dalam penyusunan laporan keuangan karena telah melalui proses akademis dalam pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan. Adapun staf yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi bisa melalui berbagai pelatihan terlebih dahulu untuk menyusun laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitatif sesuai dengan apa yang disebutkan dalam PP No 71 Tahun 2010.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya mampu memperluas populasi penelitian sehingga bisa mendapatkan suatu penelitian yang hasilnya bersifat umum dan menjadi acuan dalam penelitian.
4. Penelitian lebih lanjut disarankan tidak hanya menggunakan metode survey berupa penyebaran kuesioner, tetapi juga menggunakan metode wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta menambah jumlah sampel penelitian agar hasil penelitian lebih maksimal.
5. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel atau mengganti variabel dengan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Misalnya, pelatihan, pengalaman kerja dan kompetensi sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Botutihe, Tutun Hermawanto. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo*.
- Diana, Anastasia. Lilis Setiawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Diani, Dian Irma. 2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman), *Jurnal Universitas Negeri Padang*.
- Fransisca, Irene Ponamon: 2014. Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Pemerintahan Kota Manado.
- Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR-Study & Accounting Research. Vol XI, No. 1*.
<http://www.padang-bpk.go.id-minggu,13-01-2019-19:37WIB>
- Ihsanti, Emilda. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota), *Jurnal Universitas Negeri Padang*.
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3.
<http://papers.ssrn.com> di akses 10/4/2015.

- Madjham, Anggraeni S dkk. 2011. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo), *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo*.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi 2. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Muliani. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung). *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*.
- Mulyadi. 2011. *Auditing*. Buku Satu, Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Jurnal Accounting*. Vol 3, No 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah*. Melalui (<http://www.google.com>) 10/4/2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Melalui (<http://www.kemenag.go.id>) 10/4/2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. tentang *Perangkat Daerah*. Melalui (<http://www.kemenag.go.id>) 10/4/2015

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Melalui (<http://www.kemenag.go.id>) 10/4/2015

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. tentang *Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan*. Melalui (<http://www.ksap.org>) 29/11/2015

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Melalui (<http://www.kemenag.go.id>) 10/4/2015

Roviyantie, Devi. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Universitas Siliwangi*.

Sari, Diana. 2012. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Penelitian pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten). *Indonesian Journal of Economics and Business*.

Sari, Lusi Novita. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci). *Jurnal Universitas Negeri Padang*.

Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business*. Buku 2. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.

Susilawati dan Dwi Seftihani, 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *STAR- Study & Accounting Research*. Vol.XI, No. 1 – 2014 ISSN: 1693-4482

- Sutaruno, Rahmatia : 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
- Udiyanti, Ni Luh Nyoman Ari. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng). *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 2, No 1.*
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003. tentang *Keuangan Negara*. Melalui (<http://www.kemenag.go.id>) 10/4/2015
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. tentang *Pemerintahan Daerah*. Melalui (<http://www.kpu.go.id>) 10/4/2015
- Undang-Undang RI No 33 Tahun 2004. tentang *Perimbangan Keuangan*. Melalui (<http://www.kpu.go.id>) 10/4/2015
- Wati, Kadek Desiana. Nyoman Trisna Herawati. Ni Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Journal Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 2, No 1.*
- Windiastuti, Ruri. 2013. Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Universitas Widyatama.*
- Yenita, Devi. 2010. Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD (Study Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang). *Jurnal FE UNP*
- Yensi, Desi Sefri. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *Faculty Of Economic Riau University.*
- Yuliani, Safrida. dkk. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Banda Aceh). *Jurnal Accounting. Vol 3, No 2, 206-220.*



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Witra Maison, SE. M.Si
NIDN : 1022026304
Pangkat/Golongan : Penata TK I/ III d
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: **Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sawahlunto)**, yang dilaksanakan tahun akademik 2018/2019 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas UMMY.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 29 Juni 2019



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
(Julia Sukraini, SE. M. Si)
NIDN. 1017116201

Ketua,

(Witra Maison SE. M. Si)
NIDN. 1022026304

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY

(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)
NIDN: 1019017402